

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mengatasi Kekeringan Di Kabupaten Wonogiri

Krismona Dewi Arini,¹ Asianto Nugroho²

^{1,2}Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Disaster; Drought; Wonogiri.

Kata kunci:

Bencana; Kekeringan; Wonogiri.

Corresponding Author:

Krismona Dewi Arni, E-mail:
krismonadewia13@student.uns.ac.id

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of disaster management in Wonogiri Regency, as well as the technical and non-technical obstacles it faces. This research is a normative study with a statutory approach. The results showed that, the urgency of implementing drought disaster management in Wonogiri Regency based on the Regional Regulation of Wonogiri Regency Article 37 (2) Number 7 of 2016 through a juridical study is in accordance with vertical synchronization and harmonization of applicable laws and regulations. The Regional Disaster Management Agency of Wonogiri Regency as a disaster management task force through the Regional Budget Fund, in accordance with its authority has implemented disaster management during pre-disaster, emergency response, and post-drought disaster in 2017, 2018, 2019, and until the end. in August 2020 with the assistance of donors in the Wonogiri Regency area and from outside Wonogiri Regency.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Wonogiri, serta kendala teknis dan non teknis yang dihadapinya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, urgensi pelaksanaan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Pasal 37 (2) Nomor 7 Tahun 2016 melalui kajian yuridis telah sesuai dengan sinkronisasi vertikal dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai satuan tugas penanggulangan bencana melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sesuai dengan kewenangannya telah melaksanakan penanggulangan bencana pada saat pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana kekeringan pada tahun 2017, 2018, 2019, dan hingga akhir bulan Agustus 2020 dengan dibantu para donatur di wilayah Kabupaten Wonogiri dan dari luar Kabupaten Wonogiri.

I. Pendahuluan

Manusia memiliki hubungan timbal-balik dengan lingkungannya, karena aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya. Di sisi lain, manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal-balik tersebut terjadi antara manusia sebagai individu atau kelompok atau komunitas dengan lingkungan alamnya. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologi, hidrologi, dan demografi memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia

yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.¹

Bencana tersebut dapat berpengaruh pada perekonomian nasional, kesejahteraan, dan politik kenegaraan, sehingga menimbulkan tuntutan dari masyarakat untuk mendorong pemerintah memperhatikan aspek penanggulangan bencana melalui instrumen hukum. Hal inilah yang kemudian melahirkan politik hukum di negeri ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tanggung jawab pemerintah pada dasarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.²

Dalam bidang penanggulangan bencana, dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sedangkan dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.³

Berkenaan bencana kekeringan pada saat musim kemarau di Kabupaten Wonogiri, pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu rangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana. Pelaksanaan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri selaku instansi yang berada di bawah pemerintahan yang membidangi dinas penanggulangan bencana.⁴

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini awalnya meneliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau pada masyarakat.⁵ Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang diungkapkan responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan

¹ C.D. Balenina, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>.

² Christy Ayu Saputri and Purwono Sungkowo Raharjo, ‘Jurnal Discretie : Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Di Kota Yogyakarta Jurnal Discretie : I . Pendahuluan Kebijakan Otonomi Daerah Yaitu Suatu Kebijakan Pemerintah Pusat Yang Diberikan Kepada’, 1.2 (2020), 130–37.

³ Febry Wulandari and W Waluyo, ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019).

⁴ Proborini Hastuti, ‘Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia’, *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018, 784–99.

⁵ L Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, ‘Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>.

perundang-undangan (*statue approach*) sebagaimana dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu hasil wawancara dengan pelaksana penanggulangan bencana (BPBD Kabupaten Wonogiri). Didukung dengan sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, buku-buku ilmiah, jurnal, makalah, atau hasil ilmiah para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

III. Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah, khususnya bencana kekeringan merupakan kegiatan rutin tahunan sesuai dengan standard operasional prosedur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rangka penanggulangan kekeringan di beberapa kecamatan di Kabupaten Wonogiri mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sedangkan menurut regulasi, penanggulangan bencana kekeringan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu pra-bencana, tanggap bencana, dan pasca-bencana.⁷

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonogiri pemberlakuannya sebagai bentuk *lex posteriori derogat lex priori*. Sedangkan maksud pengharmonisasian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yaitu untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).⁸

Jika harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana tidak bermasalah, kemudian diperlukan sinkronisasi secara vertikal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjadi dasar acuan sinkronisasi, sehingga dapat ditarik korelasinya dengan substansi pasal-pasal yang mengatur tahap pra-bencana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonogiri.⁹

⁶ Zaidah Nur Rosidah, 'Coherence of the Rules of Sharia Against Pancasila', *Bestuur*, 8.1 (2020), 40 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42723>>.

⁷ Abdul Qodir Jaelani and Udiyo Basuki, 'Tax Amnesty Dan Implikasinya Terhadap Reformasi Perpajakan Di Indonesia By : Abdul Qodir Jaelani & Udiyo Basuki', *Supremasi Hukum*, 5.2 (2016), 1–21.

⁸ A K Jaelani, 'Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Pembubaran BP MIGAS: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju ...', *Jurnal Panggung Hukum*, 1.1 (2015) <[https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/isi_3._politik_hukum_putusan_mahkamah_konstitusi_\(penulis_aq_j\).pdf](https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/isi_3._politik_hukum_putusan_mahkamah_konstitusi_(penulis_aq_j).pdf)>.

⁹ Abdul Kadir Jaelani and Lusya Indrastuti, 'Public Engagement in the Implementation of the Policy on Waste Banking', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 131–43 <<https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1171>>.

Tabel 1. Sinkronisasi PP No. 21 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2009, dan Perda No. 7 Tahun 2016

Klasifikasi	(Penanggulangan Bencana-Pra Bencana-Saat Tidak Terjadi Bencana)		
	Peraturan Perundang-undangan tentang Penanggulangan Bencana	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah
	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonogiri No 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonogiri
BAB	II. Prabencana	VIII. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	I. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Bagian/Paragraf	Bagian 1. Umum	Bagian 2/Paragraf 1. Prabencana	Bagian 1/Paragraf 9 Prabencana
Pasal (ayat)	4	29	1
Uraian Substansi	Mengklasifikasikan prabencana menjadi 2 tahapan yaitu: a. Dalam situasi tidak terjadi bencana b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.	Mengklasifikasikan prabencana menjadi 2 tahapan yaitu: a. Dalam situasi tidak terjadi bencana b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.	Mengklasifikasikan prabencana menjadi 2 tahapan yaitu: a. Dalam situasi tidak terjadi bencana b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
Bagian/Paragraf			
Pasal (ayat)	5 Ayat (1), (2), (3)	30	1 Ayat (9),(10),(11),(12),(13)
Uraian Substansi	Mengklasifikasikan 8 kegiatan penyelenggaraan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana	Mengklasifikasikan 8 kegiatan penyelenggaraan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana	Mengklasifikasikan 8 kegiatan penyelenggaraan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana
Bagian/Paragraf	Bagian 3. Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana	Bagian 2. Situasi Tidak Terjadi Bencana	Bagian 3. Situasi Tidak Terjadi Bencana
Pasal (Ayat)	15	36	4,36, 37 (1), (2)
Uraian Substansi	Mengklasifikasikan 3 kegiatan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana	Mengklasifikasikan 3 kegiatan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana	Mengklasifikasikan 3 kegiatan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Sumber: diolah dari data sekunder, 2020

Kegiatan pra-bencana meliputi tindakan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini; pencegahan (*prevention*); dan upaya mengantisipasi atau mengurangi kemungkinan adanya ancaman. Dalam mengurangi risiko bencana dan memulihkan kembali kondisi pasca-bencana yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, perlu dilakukan

upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan komprehensif¹⁰ dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Wonogiri dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana baik pada saat pra-bencana, tanggap darurat, maupun pasca-bencana yang mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal.¹¹

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 19 menyatakan bahwa terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada saat pra-bencana dibagi ke dalam dua situasi, yakni situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Adanya tindakan pencegahan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, ancaman bencana, maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Dalam rentang waktu antara tahun 2017-2020, berbagai tindakan dalam tahap pra-bencana telah dilakukan oleh Pemda Wonogiri bersama dengan BPBD Kabupaten Wonogiri, beserta pihak-pihak terkait. Tindakan-tindakan tersebut meliputi pemeliharaan embung, pembangunan bak penampungan, pengelolaan air bersih dari berbagai sumber, serta adanya pelatihan masyarakat tanggap bencana.¹²

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Dalam menghadapi bencana kekeringan pada rentang tahun 2017-2020, pemerintah tentunya melakukan dropping air ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan. Selain mengandalkan bantuan dari pemerintah, bantuan air bersih juga didapat masyarakat dari berbagai donatur.¹³

Pada umumnya dalam keadaan terjadinya bencana alam, tahapan pasca-bencana sama artinya dengan masa pemulihan. Akan tetapi, dalam terjadinya bencana kekeringan, masa pasca-bencana kurang begitu terlihat tindakannya sehubungan dengan adanya pengaruh dari siklus. Dalam pelaksanaan tahapan pasca-bencana sendiri, Pemkab Wonogiri beserta pihak-pihak terkait telah melakukan berbagai upaya, seperti penanaman kembali pada saat memasuki musim penghujan, pemberian bantuan beras atau sembako sebagai akibat adanya gagal panen, serta pengelolaan dan perawatan sumber-sumber air bersih yang masih ada. Dalam upaya mengatasi kekeringan di beberapa kecamatan di Kabupaten Wonogiri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai pelaksana memiliki beberapa kendala, baik kendala teknis maupun non teknis, yakni sebagai berikut:¹⁴

a. Kendala Teknis

- 1) Keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik dari segi personel, peralatan, dan armada menimbulkan kendala dalam kegiatan operasionalnya,

¹⁰ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

¹¹ Lego Karjoko and Info Artikel, 'Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Jurnal Discretie', 1.2 (2020), 123–29.

¹² Jelang Perdana Putra Fajar, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian', *JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 1.1 (2020), 42–51.

¹³ Abdul Kadir Jaelani, Alexander A Kurniawan, and Lusya Indrastuti, 'Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusya Indrastuti Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten Dalam Inovasi Bidang Obat-Obatan Di Indonesia', 27.2 (2020), 259–74.

¹⁴ Sinung Bagas Pramuaji, I Gusti Ayu, and Ketut Rachmi, 'Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Jurnal Discretie', 1.2 (2020), 114–22.

- 2) Lokasi kawasan bencana kekeringan berupa perbukitan dengan kondisi medan yang sulit dijangkau armada,
 - 3) Pengangkatan air di Gua Jomblang beserta gua lainnya, sungai bawah tanah, dan fasilitas yang dimiliki Kabupaten Wonogiri seperti tujuh buah waduk yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri yaitu Waduk Nawangan (Giriwoyo), Songputri (Eromoko), Plumbon (Eromoko), Parangjoho (Eromoko), Kedung Uling (Eromoko), Krisak (Selogiri), dan Ngancar (Batuwarno). Namun, semua waduk tersebut juga mengalami penurunan (penyusutan) debit air, dan
 - 4) Dana yang tersedia terbatas dari APBN, APBD difokuskan kembali (*refocusing*) untuk pembangunan sarana teknis sirkulasi hidrologi dan APBDes, serta dana desa diprioritaskan pada bidang infrastruktur.
- b. Kendala Non-Teknis

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Wonogiri, yaitu bantuan keuangan dan air dropping berasal dari para donatur yang berempati. Para donatur tersebut berasal dari berbagai kalangan seperti dari organisasi kemasyarakatan, instansi swasta, BUMN dan BUMD, serta pengusaha dalam dan luar negeri yang secara langsung diberikan kepada masyarakat terdampak kekeringan tanpa melalui Pemerintah Kabupaten Wonogiri terlebih dahulu. BPBD Kabupaten Wonogiri pun kesulitan dalam penyusunan laporan bencana kekeringan dan *input database*. Meskipun demikian, BPBD Kabupaten Wonogiri telah menghimbau agar para donatur untuk menjalani prosedur sesuai dengan sistem operasional prosedur yang diprogramkan oleh satuan tugas bencana yang berlangsung setiap tahun.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa urgensi pelaksanaan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Pasal 37 (2) Nomor 7 Tahun 2016 melalui kajian yuridis telah sesuai dengan sinkronisasi vertikal dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai satuan tugas penanggulangan bencana melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sesuai dengan kewenangannya telah melaksanakan penanggulangan bencana pada saat pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana kekeringan pada tahun 2017, 2018, 2019, dan hingga akhir bulan Agustus 2020 dan dibantu para donatur di wilayah Kabupaten Wonogiri.

References

- Balenina, C.D., 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>
- Fajar, Jelang Perdana Putra, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian', *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 1.1 (2020), 42–51

- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Hastuti, Proborini, 'Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia', *Symposium Nasional Keuangan Negara*, 2018, 784–99
- Jaelani, A K, 'Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Pembubaran BP MIGAS: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju ...', *Jurnal Panggung Hukum*, 1.1 (2015) <[https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/isi_3._politik_hukum_putusan_mahkamah_konstitusi_\(penulis_aqi\).pdf](https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/isi_3._politik_hukum_putusan_mahkamah_konstitusi_(penulis_aqi).pdf)>
- Jaelani, Abdul Kadir, and Lusya Indrastuti, 'Public Engagement in the Implementation of the Policy on Waste Banking', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 131–43 <<https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1171>>
- Jaelani, Abdul Kadir, Alexander A Kurniawan, and Lusya Indrastuti, 'Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusya Indrastuti Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten Dalam Inovasi Bidang Obat-Obatan Di Indonesia', 27.2 (2020), 259–74
- Jaelani, Abdul Qodir, and Udiyo Basuki, 'Tax Amnesty Dan Implikasinya Terhadap Reformasi Perpajakan Di Indonesia By : Abdul Qodir Jaelani □ & Udiyo Basuki □', *Supremasi Hukum*, 5.2 (2016), 1–21
- Kajoko, L, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>
- Karjoko, Lego, and Info Artikel, 'Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Jurnal Discretie ', 1.2 (2020), 123–29
- Pramuaji, Sinung Bagas, I Gusti Ayu, and Ketut Rachmi, 'Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Jurnal Discretie ', 1.2 (2020), 114–22
- Rosidah, Zaidah Nur, 'Coherence of the Rules of Sharia Against Pancasila', *Bestuur*, 8.1 (2020), 40 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42723>>
- Saputri, Christy Ayu, and Purwono Sungkowo Raharjo, 'Jurnal Discretie : Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Di Kota Yogyakarta Jurnal Discretie : I . Pendahuluan Kebijakan Otonomi Daerah Yaitu Suatu Kebijakan Pemerintah Pusat Yang Diberikan Kepada', 1.2 (2020), 130–37
- Wulandari, Febry, and W Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019)